

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Arba, H. M., *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, Edisi Revisi, 2001.
- Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni, 1993.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Tintamas, 1983.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Indrajaya, Rudi, dkk., *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2020.
- Lubis, Mohamad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, C.V. Andi Offset, 2011.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2018.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika-Universitas Terbuka, 1988.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan; Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju, 2013.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, KaryaMedia, 2010.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Prakosa, Ketut Bambang, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Ekonisa, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Setara Press, 2016.
- Saleh, Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 2007.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Satrio, J., *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Setiabudi, Jayadi, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Yogyakarta, Buku Pintar, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2005.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003.
- Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Tanuwidjaja, Henny, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Notariat*, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Tirlin, Triniken Tiyas, Bahan Ajar Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

Wibawanti, E.S., & R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta, Liberty, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Peubahannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1157).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tesis:

Verawati, Revi, "Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Akta Pembagian Warisan (APW) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di Yogyakarta", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.

Jurnal:

Ali, Hasbullah, Sumarwoto, Yudhi Widyo Armono, "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta", *Jurnal Justicia*, 11, No. 1, (2022).

Amelia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Pewarisan", *Jurnal Analogi Hukum*, 5, No. 1, (2023).

Murni, Christina Sri, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, No. 2, (2020).

Prabandari, Dewi Yunita, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, No. 2, (Juli 2023).

Arief Rahman, dkk., “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5, No. 1, (Juni 2020).